



RENCAJA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KECAMATAN KEBONAGUNG

TAHUN 2025



Kirim Email Di Sini
kec.kbagung@gmail.com



Kunjungi Laman Kami
keckebonagung.demakkab.go.id



Kunjungi Sosmed Kami
[kecamatan_kebonagung](https://www.instagram.com/kecamatan_kebonagung)

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta dengan adanya Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, maka Kecamatan Kebonagung menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi kerangka acuan dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah Kecamatan Kebonagung ditahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2025 merupakan Dokumen yang secara substansial menjadi penerjemah dari visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak. Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Jangka Menengah Daerah disusun sesuai arahan operasional dalam Renjana Kerja Pemerintah Daerah yang akan menjadi masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Kabupaten Demak. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 akan menghasilkan perencanaan program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja kecamatan kebonagung kabupaten Demak.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung tahun 2026, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten demak Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 adalah :

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026;
2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja kecamatan kebonagung;
3. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun di Tahun 2025;
4. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada kecamatan kebonagung;
5. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Kecamatan Kebonagung
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Menguraikan tentang kondisi pelayanan Kecamatan Kebonagung. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2025.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang tujuan dan sasaran beserta target kinerja Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan perubahan rencana kerja merupakan bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan target capaian kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025. Target capaian kinerja ini merupakan target capaian yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Realisasi capaian yang menjadi tolak ukur pada evaluasi ini, diawali dari tahun sebelumnya selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan perubahan rencana kerja dilakukan setiap tahun untuk memberikan dasar dalam menentukan target kinerja pada tahun tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahun sebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga penentuan target kinerja menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) serta target kinerja program/kegiatan maupun realisasi tahun 2025 kecamatan kebonagung melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan. Yang semula diperencanaan RKPD adalah sebesar Rp. 2.832.543.700,- kemudian pada penetapan APBD menjadi sebesar Rp. 2.740.668.700,- berubah karena efisiensi menjadi sebesar Rp. 2.695.843.700,- dan berubah lagi karena pergeseran atau perubahan menjadi sebesar Rp. 2.644.487.251,-. Dimana pada triwulan I ini telah terealisasi sebesar Rp. 394.545.776,- atau sebesar 14,92%

Evaluasi dari realisasi pelaksanaan perubahan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2025, adalah sebagai berikut;

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator presentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target kinerja 100%, dan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.327.593.700,- terealisasi sebesar Rp. 292.044.076,- atau terserao sebesar 12,55%.
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum terealisasi atau masih 0% dari pagu anggaran Rp. 3.250.000,-. Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah masih 0% dari pagu anggaran Rp. 34.675.000,- Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi Rp. 3.513.500,- atau sebesar 6,05% dari pagu anggaran Rp. 58.100.000,- Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum terealisasi, atau masih 0% dari pagu sebesar Rp. 155.400.000,- Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 9.405.514,- atau sekitar 4,51 % dari pagu sebesar Rp. 208.500.000,- Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.
- b. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah dan pelayanan publik , dengan indikator Presentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yangn baik belum terrealisasi atau masih 0% dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk capaian Kinerja belum tercapai pada tw I, akan dilaksanakan pada Tw berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa,dengan indikator pres4ntase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahanan desa dari pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- terserap sebesar Rp. 5.027.500,-atau sebesar 5,91%. Untuk capaian Kinerja belum

tercapai pada tw I, karena memang direncanakan akan dilaksanakan pada Tw berikutnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terrealisasi sebesar Rp. 273.373.719,- atau sebesar 14,82 % dari pagu anggaran Rp1.844.163.700,-. Capaian Kinerja 100%.
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, terrealisasi sebesar Rp. 19.973.500,- atau sebesar 57,07% dari pagu sebesar Rp. 35.000.000,- Capaian Kinerja 100%.
 - 3) Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terrealisasi sebesar Rp.22.585.400,- atau sebesar 22,59% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Capaian Kinerja 100%.
 - 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terrealisasi sebesar Rp. 54.915.300,- atau sebesar 43,93% dari anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- Capaian Kinerja 100%
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Belum ditemukan program/kegiatan yang melebihi target kinerja dari target yang telah ditetapkan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau target anggaran, dikarenakan adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan yang direncanakan di tahun 2025.
 - b. Faktor penyebab tercapainya kinerja di beberapa kegiatan diantara karena rutinitas dan tidak berdampak efisiensi anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kebonaugng; dan yang telah direncanakan.
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra, pada kecamatan kebonagung berdampak positif pada kelancaran administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target kinerja berdampak pada penyampaian realisasi keuangan kecamatan kebonagung.
- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab diantaranya;
 - a. Perlu adanya koordinasi dari berkesinambungan antara para Kasi, dan Kasubag Program yang membidangi kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja.
 - b. Perlu adanya evaluasi bersama terhadap kegiatan yang telah ditetapkan

Evaluasi Realisasi capaian kinerja kecamatan Keronagung tahun 2025 Tw I dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

abel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW 1
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	8	8	4	0	0	4	12	150,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	1	0	0	1	3	150,00
7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2	1	0	0	1	3	100,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	2	1	0	0	1	3	75,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	1	0	0	1	3	150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	10	6	2	2	100	2	8	80,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44	21	12	7	58,333333	12	33	75,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dipenuhi	49	18	12	3	25	12	30	61,22
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	0	0	100	200	200,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99	45	12	0	0	12	57	57,58
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	50	50	100	100	100,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	3	1	0	0	1	4	80,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	9	12	0	0	12	21	140,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	31	12	8	-	0	8	20	64,52
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	4	0	0	4	11	157,14
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	2	0	0	#DIV/0!	0	2	28,57
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	100	100	100	25	25	100	100	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	4	2	2	100	2	6	120,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	3	6	3	0	0	3	9	300,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	95	20	15	0	0	15	35	36,84

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	10	5	1	0	0	1	6	60,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	0	8	2	0	0	2	10	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	100	100	50	50	100	100	100,00
7.01.02.1.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	0	1	1	0	0	1	2	100,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1	1	0	0	1	2	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6	3	1	1	100	1	4	66,67
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	3	1	1	100	1	4	133,33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	100	100	50	50	100	100	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan	8	6	2	1	50	2	8	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	3	15	5	5	100	5	20	666,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	3	1	0	0	1	4	80,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	100	100	100	40	40	100	100	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22	12	5	2	40	5	17	77,27
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	3	1	1	100	1	4	80,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17	9	4	1	25	4	13	76,47
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.05.2..01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10	6	2	2	100	2	8	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	144	180	60	0	0	60	240	166,67
7.01.05.2.01.05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	5	2	1	0	0	1	3	60,00
7.01.06	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	100	100	100	0	0	100	200	200,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	23	13	4	0	0	4	17	73,91
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	3	1	0	0	1	4	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	3	1	0	0	1	4	80,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	2	1	0	0	1	3	60,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	0	0	1	3	60,00

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025

N O	Program Unggublumlan/Re ncana Implementasi/Du kungan Kegiatan	Indikator	Satua n	Dat a awal (202 0)	Targe t Akhir Renst ra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Subkegiata n
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realis asi Kinerj a	Realisasi Anggara n	Kine rja (APB D)	Anggara n (APBD)	Kine rja (APB D)	Anggara n (APBD)	Kinerja (%)	Anggara n (%)	Targ et Kine rja (APB D)	Target Anggara n (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggara n (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11 /9)	14=(12/ 10)	15	16	17=7+11 +15	18=8+12 +16	19
I	PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA																	
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah Kegiatan FKUU yang dilaksana kan	Kegiat an	1	17	9	220.359. 500	4	75.000. 000	1	11.254. 000	25	15,01	4	100.000. 000	17	320.359. 500	7.01.04.2.0 1.02
8	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT																	
	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	Jumlah orang yang mengikut i pelatihan	Orang	100	500	300	113.686. 500	100	75.000. 000	0	0	0	0	100	75.000.0 00	500	121.186. 500	7.01.03.2.0 1.02

Evaluasi Pelaksanaan program unggulan Bupati sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- telah dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 11.254.000,- atau 15,01%. Untuk tahap kedua dan ketiga dilaksanakan di TW II, dibulan April 2025 dan 1 kegiatan akan direncanakan pada triwulan III (Bulan Agustus) tahun 2025.
2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan akan dilaksanakan di triwulan II (Bulan Mei) tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Demak tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kebonagung, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kebonagung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebonagung Tahun 2025, hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kebonagung yang dapat terealisasi mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2021 – 2026. Dan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung tahun 2021 – 2026 terdapat Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat).

Pada Kecamatan Kebonagung tidak memiliki IKK maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Indikator nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung, Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti tidak menjadi IKU pada Renstra 2021 – 2026. Maka ketiga indikator tersebut di atas tidak dicantumkan targetnya. Tetapi untuk ketiga indikator tersebut dapat diukur capaian atau realisasinya, sehingga nilai capaiannya dapat dicantumkan. Pada Renstra tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama Kecamatan Kebonagung. Indikator Kinerja Utama tersebut akan lebih detail dan dituangkan pada Tabel 2.2 berikut ini:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kebonagung dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak. Adapun tugas pokok OPD Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Adapun isu-isu penting atau masalah dan tantangan yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.
2. Jumlah ASN masih belum sesuai kebutuhan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

3. Kurangnya sarana prasarana yang menunjang kinerja ASN dalam menunjang pelayanan publik yang responsif dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
4. Pemanfaatan pelayanan berbasis teknologi informasi belum maksimal digunakan oleh masyarakat.
5. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan, menjaga kebersihan lingkungan masih kurang optimal.
6. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan optimal dan baik.
7. Belum berkembangnya BUMDES secara signifikan, hal ini karena BUMDES belum dapat difungsikan secara maksimal.
8. Masih rendahnya pemahaman tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa.
9. Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata.
10. Jumlah anggota Linmas di beberapa desa masih belum sesuai dengan kebutuhan.
11. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masih kurang.
12. Masih adanya pelanggaran terhadap Perda, Perbup ataupun Undang-undang yang lainnya.
13. Perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil.
14. Masih adanya potensi konflik di masyarakat.
15. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
16. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa belum optimal.
17. Kurangnya kedisiplinan, kemampuan serta pengetahuan bagi pengelola pemerintahan desa.
18. Kurangnya SDM yang menguasai pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi di tingkat desa, sedangkan jumlah aplikasi yang dikelola oleh desa itu banyak sekali.

Berdasarkan isu-isu penting atau masalah yang dihadapi oleh Kecamatan Kebonagung, maka tindak lanjut yang harus dilakukan dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Memberdayakan jumlah ASN yang ada dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas dan etos kerja ASN melalui program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.
4. Peningkatan SDM bagi Lembaga Desa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa melalui musrenbangcam.
6. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa melalui Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dan keuangan desa.
7. Monitoring dan fasilitasi BUMDes.
8. Pelatihan Masyarakat lewat kegiatan UMKM guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui siskamling.
10. Memberikan sosialisasi tentang Perda, Perbup ataupun Perundang-undangan yang ada berlaku secara berkala kepada masyarakat , sehingga masyarakat akan mengerti pentingnya taat aturan dan hukum yang berlaku.
11. Menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di masyarakat.
12. Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui forum komunikasi ulama umaro, upacara hari-hari besar nasional dan daerah serta penyelenggaraan pentas seni dan budaya.

Dampak atas masalah dan tantangan yang dihadapi, terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah adalah sebagai berikut;

1. Kemampuan pemeritah daerah dalam mencapai kualitas sumberdaya manusia
2. Program program unggulan tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh kecamatan

Untuk dampak masalah yang timbul tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh kecamatan Kebonagung, diantaranya;

1. Kecamatan Kebonagung memprioritaskan program program yang paling penting dan berdampak besar bagi masyarakat.
2. Pemerintah Kecamatan Kebonagung perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi.
3. Pemerintah kecamatan Kebonagung perlu mengelola sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

2.4. Review Terhadap Renja 2025

Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas dapat dirumuskan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan membandingkan hasil dari RKPD murni dengan Hasil Analisa Kebutuhannya. Berdasarkan RKPD murni kecamatan Kebonagung untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.832.543.700,- sedangkan dari Analisa kebutuhan sebesar Rp. 2.644.487.251,- atau berkurang sebesar Rp. 188.056.449,-. Pengurangan tersebut karena ada 5 Program kegiatan yang bergeser naik ataupun bergeser turun , diantaranya;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan RKPD murni, dialokasikan sebesar Rp. 1.890.043.700,- sedang pada hasil Analisa Kebutuhan sebesar Rp. 1.782.487.251. Selisih besaran anggaran disebabkan salah satunya adalah jumlah tenaga kerja yang ada.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RKPD murni adalah sebesar Rp. 567.500.000,- sedang dari hasil Analisis kebutuhan sebesar Rp. 485.475.000,-. Selisih kurang disebabkan adanya sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik , pada RKPD murni sebesar Rp. 35.000.000, sedang pada Hasil Analisa kebutuhan adalah sebesar. Rp. 30.600.000,-. Selisih berkurang dikarenakan salah satu kegiatan dilaksanakan pada bulan Ramadan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Berdasarkan RKPD murni sebesar Rp. 100.000,000,- menjadi Rp.

98.200.000,- pada Hasil Analisa Kebutuhan. Selisih ini disebabkan pengurangan honor Narsum pada salah satu sub kegiatan.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, berdasarkan RKPD murni sebesar Rp. 125.000.000,- berubah naik menjadi Rp.134.975.000,- pada hasil analisa kebutuhan. Bertambahnya pagu anggaran dikarenakan naiknya salah satu pagu anggaran makan minum rapat pada salah satu sub kegiatan.

Untuk lebih jelas lagi, dapat bdilihat dari tabel 2.4 dibawah ini;

Tabel 2.4
Review terhadap Renja tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kebonagung

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2		3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN KEBONAGUNG					Rp 2.832.543.700							2.644.487.251	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	Rp 1.890.043.700		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	Rp 1.782.462.251	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	4	Rp 4.000.000			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	4	Rp 3.250.000	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Rp 1.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Rp 625.000	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 1.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 1.000.000	
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 1.000.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 1.000.000	
No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2		3	4	5	6		7		8	9	10	11	12

4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp	1.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp	625.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	2	Rp	1.886.043.700			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	2	Rp	1.779.212.251	
5			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanga ASN	12	Rp	1.761.524.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanga ASN	12	Rp	1.668.292.551	
6			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dipenuhi	12	Rp	124.519.700			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dipenuhi	12	Rp	110.919.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100		567.500.000			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100	Rp	485.475.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp	102.000.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp	59.283.000	
7			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kec. Kebonagung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Rp	52.000.000			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kec. Kebonagung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Rp	59.283.000	Penambahn Belanja Jasa Penyelenggara Acara

No	Renja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
															Lokasi
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
8			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70	Rp 50.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Rp -	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp 78.100.000			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp 61.190.000	
9			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 6.000.000			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 900.000	Pengura ngan penyediaan lampu jalan (sudah cukup)
10			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 20.000.000			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 20.000.000	
11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp 8.500.000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp 8.500.000	
12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Rp 3.600.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Rp -	Sudah tidak mengangarkan sub keg ini
13			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 40.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 31.790.000	Menambah Jumlah SPPD Dalam Kota

No	Renja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
									Lokasi				
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	3	Rp 155.400.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	19	Rp 141.192.000	
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Rp 77.700.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 72.837.000	Penyesuaian jumlah rincian
15		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 77.700.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	Rp 68.355.000	Penyesuaian jumlah rincian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia	100	Rp 23.500.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia	100	Rp 23.500.000	
16		Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp 4.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp 4.000.000	
17		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp 19.500.000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp 19.500.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	34	Rp 208.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	16	Rp 200.310.000	Masuk dalam SPP Dalkot

No	Renja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
										Lokasi					
1	2			3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
18			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Rp 75.000.000			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp 75.000.000	
19			Pemeliharaan Mebel	Kec. Kebonagung	Jumlah mebel yang terpelihara	3	Rp 10.000.000			Pemeliharaan Mebel	Kec. Kebonagung	Jumlah mebel yang terpelihara	1	Rp 3.000.000	Sebagian mebeleur masih dalam kondisi yang, 1 unit yang perlu pemeliharaan
20			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	15	Rp 8.500.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	11	Rp 7.310.000	Pengurangan pemeliharaan utk sound yang masih dalam kondisi baik
21			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	2	Rp 100.000.000			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	1	Rp 100.000.000	
22			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	2	Rp 15.000.000			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	1	Rp 15.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
													Lokasi
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	Rp 35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	Rp 30.600.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dii tingkat kecamatan	1	Rp 10.000.000		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dii tingkat kecamatan	1	Rp 10.000.000	
23		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Rp 10.000.000		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Rp 10.000.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	Rp 25.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	Rp 20.600.000	
24		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Rp 25.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Rp 20.600.000	Kegiatan dilaksanakan di Bulan Puasa, sisa Anggaran Snack dimasukkan dalam Sub Keg Fas Adm Tapem

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
													Lokasi
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	Rp 100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	Rp 98.200.000	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan	2	Rp 100.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan	2	Rp 98.200.000	
25		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Rp 25.000.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Rp 23.200.000	Mengurangi anggaran Narsum yg ttidak terserap, dimasukkan dalam honor narsum profesional SDM
26		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Rp 75.000.000		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Rp 75.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
							Lokasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100	Rp 125.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100	Rp 134.975.000			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 125.000.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 134.975.000			
27		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Rp 50.000.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Rp 59.975.000	Mengurangi Honor Narsum yang tidak terserap, dan dimasukkan dalam anggaran Makan Minum untuk rakor forkompimcam
28		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Rp 75.000.000		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Rp 75.000.000	

N o	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
							Lokasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	Rp 30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	Rp 30.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	Rp 30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	Rp 30.000.000	
29	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	Rp 20.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	Rp 20.000.000	
30	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	1	Rp 10.000.000	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	1	Rp 10.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
									Lokasi				
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	100	Rp 85.000.000	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	100	Rp 82.775.000	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	4	Rp 85.000.000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	4	Rp 82.775.000	
31		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Rp 20.000.000		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Rp 20.000.000	
32		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Rp 20.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Rp 24.525.000	Untuk Rakor Intensifikasi PBB
33		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Rp 20.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Rp 16.250.000	
34		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Rp 25.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Rp 22.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan termasuk dalam pemangku kepentingan atau perangkat daerah yang mengusulkan program dan kegiatan (berdasarkan hasil musrenbangcam) kepada perangkat daerah terkait,

Tabel 2,5
*Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2025*

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Kebonagung
1

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi. Fungsi Kecamatan Kebonagung sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kecamatan Kebonagung juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Upaya pemerintah dalam penanganan stunting tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Terkait kebijakan nasional tersebut, Kecamatan Kebonagung juga berperan aktif dalam mendukung program nasional penanganan stunting. Serta mendukung penurunan angka kemiskinan, dengan dasar Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Selain itu juga

mendukung program-program yang tercantum dalam ASTACITA diantaranya adalah penegakan Hukum dan Tata Kelola Digital; Ketahanan Pangan, Kebijakan Ekonomi, Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan, Pembangunan Sumber Daya Manusia, kemandirian Energi serta Perlindungan Kionsumen. Dukungan terhadap program nasional tersebut tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Diantaranya mewujudkan Kecamatan Berdaya dan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang bertujuan untuk meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Kebonagung adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung dan Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kebonagung dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021-2026. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebonagung adalah Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung dan terwujudnya pelayanan publik yang responsif.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025, penyusunan renja perubahan didasari dari hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja tahun 2024, adalah sebagai berikut :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 1.497.052.329,- atau 90,40% dari total anggaran Rp. 1.656.078.500,-. Hal ini menunjukkan serapan anggaran belum maksimal dikarenakan pada tahun berjalan ada beberapa ASN yang purna tugas, tetapi target kinerja tercapai 100 %.
 - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, realisasi sebesar Rp. 23.027.500,- atau 76,51% dari total anggaran Rp. 30.098.200,-. dengan capaian kinerja 100%.
 - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, realisasi sebesar Rp. 62.201.000,- atau 91,73% dari total anggaran Rp. 67.807.500,-. Realisasi tersebut menunjukkan jika kegiatan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi target kinerja tercapai 100%.
 - d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, realisasi sebesar Rp. 148.961.700,- atau 92,81% dari total anggaran Rp. 160.500.000,-. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan target kinerja tercapai 100%.
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.670.500 atau 88,55% dari total anggaran Rp. 67.388.400,-. Realisasi tersebut menunjukkan ada sub kegiatan yang belum bisa dilakukan secara maksimal, akan tetapi target kinerja sudah tercapai 100%,
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, realisasi sebesar Rp.22.815.000,- atau 88,09% dari anggaran Rp. 25.900.000,-. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan sempurna tetapi untuk target kinerja tercapai 100%, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program dan kegiatan

- yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung sampai tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, jadi belum ada yang melebihi dari target kinerja.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya serapan anggaran, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target anggaran kinerja program/kegiatan :karena berkaitan dengan instansi lain, dimana jadwal kegiatan yang dilaksanakan terkadang bersamaan dengan kegiatan lainnya.
 - b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
 - 1) Dukungan APBD Kabupaten Demak
 - 2) Kerjasama super team yang solid

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang menunjang tujuan dan sasaran kerja kecamatan Kebonagung telah dituangkan yang berupa evaluasi terhadap Pelayanan Publik, Capaian Kinerja OPD dan keluhan. Untuk melihat besaran target Tujuan dan sasaran daoat vdilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Uraian	Indikator	Realisasi		TARGET		
		2024	2025 TW 1	RPJMD pada tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	69,35	n/a	73,5	73,5	73,5
Sasaran : Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentas Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	50%	n/a	100%	100%	100%
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,36	n/a	83,33	83,33	84,6
Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak. Merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung dalam Perubahan Renja Tahun 2025 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian

serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Demak. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kebonagung. Pada Tahun 2025 Kecamatan Kebonagung merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelatihan UKM dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya.

Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kebonagung Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Administrasi Keuangan, Program Administrasi Umum dan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2025, Kecamatan Kebonagung mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di Wilayah Kecamatan Kebonagung.

4.1.2 Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung pada anggaran tahun 2025 adalah 6 (Enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan didalamnya.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kebonagung, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Kebonagung dan juga Kantor Kecamatan Kebonagung sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Demak.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.832.543.700,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD untuk TPP. Pengurangan anggaran sebanyak Rp 188.065.449,- karena efisiensi anggaran dan penyesuaian anggaran pada belanja operasi dan belanja modal, yang kemudian terjadi perubahan anggaran sesuai kebutuhan menjadi sebesar Rp. 2.644.484.251,-

4. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja 2025 adalah sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Kecamatan Kebonagung untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kecamatan Kebonagung menetapkan program-program sesuai dengan Fungsi Pelayanan Umum dan Urusan Kewilayahan. Penetapan program pembangunan urusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5. Berdasarkan sasaran “Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung”

Program yang mendukung adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

6. Berdasarkan sasaran “Terwujudnya pelayanan publik yang responsif”

Program yang mendukung adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

c. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada Perubahan Renja tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran yang semula Rp. 2.832.543.700,- menjadi sebesar Rp. 2.644.484.251,- atau terjadi selisih berkurang sebesar Rp. 188.065.449,-. Adapun Rincian perubahan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Semula sebesar Rp. 2.457.543.700,-menjadi Rp. 2.267.937.251,-. Efisiensi dan perubahan anggaran terjadi pada kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, semula Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 3.250.000,-. Perubahan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Semula Rp. 1.000.000,- menjadi Rp.625.000,-. Pengurangan pada SPPD karena efisiensi anggaran.
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, semula Rp. 102.000.000, menjadi Rp.59.283.000,-. Penambahan pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, semula Rp. 52.000.000,- menjadikan Rp. 59.283.000,-.

Perubahan penambahan dikarenakan penambahan belanja jasa penyelenggara Acara. Dan pengurangan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang semula Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 0,-

- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, semula Rp. 78.100.000,- menjadi Rp. 61.190.000,- . Perubahan pengurangan pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik, hal ini karena lampu penerangan jalan sudah cukup dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan karena sudah menggunakan media sosial, dan penambahan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000 karena efisiensi anggaran dan berubah menjadi Rp. 31.790.000,-, penambahan jumlah sppd dalam kota.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula Rp. 155.400.000,- menjadi Rp. 141.192.000,- berkurang karena penyesuaian rincian belanja.
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 208.500.000,- menjadi Rp. 200.310.000,- pengurangan karena pemeliharaan mebeler.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik. Yang semula Rp. 35.000.000,- menjadi Rp. 30.600.000,-, berkurang karena pelaksanaan di bulan Ramadhan sehingga anggaran makan minum dialihkan pada sub kegiatan lainnya.
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Yang semula Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 98.200.000,- pengurangan anggaran dari narsum dialihkan pada sub kegiatan SDM.
 - d. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 125.000.000,- menjadi Rp. 134.975.000,- bergeser untuk subkegiatan forkompicam.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, berkurang dari Rp. 85.000.000,- menjadi Rp. 82.775.000,-

bergeser pada sub kegiatan lainnya.

Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan urusan Kewilayahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kebonagung Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kebonagung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KEBONAGUNG								2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00					3.275.538.742,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	2.457.543.700,00	2.365.668.700,00	2.267.937.251,00	342.497.104,00							2.800.040.804,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 persen	100 persen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00	-750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		0,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib				0 % 100 %	0 % 100 %	1.886.043.700,00	1.844.168.700,00	1.779.212.251,00	-106.831.449,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		2.462.776.657,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	0,00	1.719.649.000,00	1.668.292.551,00	1.668.292.551,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			2.285.558.497,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	124.519.700,00	110.919.700,00	110.919.700,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			177.218.160,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	102.000.000,00	52.000.000,00	59.283.000,00	-42.717.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		110.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	0,00	52.000.000,00	59.283.000,00	59.283.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			60.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100% Orang	100% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	78.100.000,00	78.100.000,00	61.190.000,00	-16.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		56.486.620,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	6.000.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			6.913.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			18.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			8.932.620,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			5.287.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	121 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	31.790.000,00	-8.210.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			16.854.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	155.400.000,00	155.400.000,00	141.192.000,00	-14.208.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		43.700.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	77.700.000,00	72.837.000,00	72.837.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			35.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	77.700.000,00	68.355.000,00	68.355.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			8.700.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>jumlah materai tagihan listrik, air telepon terbayar tersediannya jasa penunjang kantor kecamatan</i>				0 % 100 %	0 % 100 %	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		28.382.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		4.382.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		24.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>				100 %	100 %	208.500.000,00	208.500.000,00	200.310.000,00	-8.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		98.695.527,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		52.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		6.168.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12 Unit	0,00	8.500.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city		8.992.171,00	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			21.535.356,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	NON URUSAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
	7.01	KECAMATAN							2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	-188.056.449,00							3.275.538.742,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	30.600.000,00	10.000.000,00							45.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kebonagung				0 % 100 %	0 % 100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			15.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang baik				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	20.600.000,00	-4.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	98.200.000,00	5.000.000,00							105.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	98.200.000,00	-1.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		105.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	25.000.000,00	25.000.000,00	23.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat 8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat			75.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	134.975.000,00	65.000.000,00							190.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban				100% Laporan	100% Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	134.975.000,00	9.975.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		190.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	59.975.000,00	9.975.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			90.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama 1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama			100.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	17.500.000,00							47.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan umum				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		47.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Keterangan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			17.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa				100 %	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	82.775.000,00	2.997.938,00							87.997.938,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis				100 %	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	82.775.000,00	-2.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Pemerintah Desa		87.997.938,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	24.525.000,00	4.525.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.250.000,00	-3.750.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			27.997.938,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

	J U M L A H	2.832.543.700,00	2.740.668.700,00	2.644.487.251,00	98.814.257.813,34		3.275.538.742,00	
--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Untuk mencapai Program Prioritas yang berupa FKUU dan UMKM, Kecamatan Kebonagung mengalokasikan sebesar Rp. 150.000.000,-. Dengan rincian untuk anggaran kegiatan FKUU sebesar Rp. 75.000.000,- dan anggaran kegiatan UMKM sebesar Rp. 75.000.000,-. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro, dimana akan dilaksanakan dalam 4 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Sedangkan Kegiatan Pelatihan UMKM, akan dilaksanakan kegiatan pelatihan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- yang diikuti 100 peserta.

Adapun Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA												
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah Kegiatan FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	11.252.000	4	75.000.000	4	100.000.000	17	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT												
	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Orang	100	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	500	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah

Selain program prioritas yang mengacu pada Renstra 2021-2026, Renja 2026 juga memperhatikan Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Program Prioritas yang dilaksanakan Kecamatan Kebonagung pada tahun 2026 mengacu pada Program Unggulan Bupati periode 2025-2029, yaitu;

1. Demak Cerdas dan Berkarakter
2. Demak Relegius
3. Demak Produktif dan Mandiri
4. Demak Smart Governance
5. Demak Mantap
6. Demak Tangguh dan Lestari

Kecamatan Kebonagung mengambil 1 program prioritas yaitu Demak Rlegius yang dilakssanakan pada kegiatan FKUU.

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	nggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PP 2 DEMAK RELIGIUS KP 5 FASILITASI FORUM ULAMA UMARO												
	AP3. safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial	Jumlah kegiatan safari keagamaan dan kolaborasi sosial di kecamatan (santunan, edukasi keluarga, safari dakwah)											
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah Kegiatan FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	3	71.523.500	4	75.000.000	2	75.000.000	12	375.000.000	7.01.04.2.01.0002	

BAB V.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kebonagung. Rencana kerja (Renja) ini nantinya sebagai rencana awal bagi OPD Kecamatan Kebonagung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan oleh perangkat daerah terkait hal-hal sebagai berikut :

5.1. Catatan Penting

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja 2025 telah berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk pengusulan Perubahan Renja 2025 dilakukan input melalui SIPD. Kecamatan Kebonagung mendapat Belanja Prioritas sebesar Rp 100.000.000,- yang akan diperuntukkan pemeliharaan atap rumah dinas Camat Kebonagung.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kebonagung tahun 2025. Untuk itu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh elemen di lingkungan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai

tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

2. Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2025 dan menjadi acuan bagi sekretariat dan seksi-seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
3. Selama pelaksanaan renja dimaksud, harus dilakukan pengendalian, yaitu monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor keberhasilan maupun faktor penghambat apabila program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

4. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Kebonagung selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kebonagung . Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak.
5. Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kebonagung, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kebonagung.

Kebonagung, Juli 2025

Plt. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK

YOGI SETYAWAN WIDI N., S.STP., MM.
NIP. 19920113 201206 1 001

Lampiran 1.

*PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					
X	X X	1	2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat	Dokumen	X	X X	1	1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
					daerah												
X	X X	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	X	X X	1	1. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	X X	1	2. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	X	X X	1	1. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen
X	X X	1	2. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	X	X X	1	1. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
X	X X	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	X	X X	1	1. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	X X	1	20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	Dokumen	X	X X	1	10 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	X X	1	20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an	X	X X	1	10 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an
X	X X	1	20 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	X	X X	1	10 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					
X	X X	1	20 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	X	X X	1	10 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
X	X X	1	20 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	X	X X	1	10 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	X X	1	20 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang	X	X X	1	10 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang
X	X X	1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	X	X X	1	10 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	X X	1	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	X X	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	X X	1	20 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	X	X X	1	10 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	X X	1	20 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	X	X X	1	10 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	X X	1	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Dokumen	X	X X	1	10 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Dokumen
X	X X	1	2. 06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	X	X X	1	10 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
X	X X	1	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	X	X X	1	10 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	X X	1	20 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	X	X X	1	10 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
X	X X	1	2. 07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	X	X X	1	10 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persen	X	X X	1	10 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
X	X X	1	20 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	X	X X	1	10 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	X X	1	20 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	X	X X	1	10 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	X	X X	1	10 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	X X	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	Unit	X	X X	1	10 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	Unit
X	X X	1	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	X	X X	1	10 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	X X	1	20 9	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	X	X X	1	10 9	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	Unit	X	X	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	Unit
X	X	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	1	109	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	X	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	1	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	X	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	1	109	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN				7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1				KECAMATAN				7	1				KECAMATAN			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	1	2	20 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	1	2	20 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	1	2	20 1	1	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	1	2	20 1	1	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan

SEMULA							MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyar akatan
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7	1	4	20 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan	7	1	4	20 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7	1	4	20 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	1	4	20 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7	1	4	20 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7	1	4	20 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	1	4	20 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	Laporan	7	1	4	20 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	1	4	20 2	1	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian	Laporan	7	1	4	20 2	1	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian	Laporan

SEMULA								MENJADI							
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
				Indonesia	Negara Republik Indonesia						Indonesia	Negara Republik Indonesia			
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
7	1	5	20 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraa n urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	laporan	7	1	5	20 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7	1	5	20 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	7	1	5	20 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7	1	5	20 1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	7	1	5	20 1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	Persen	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	1	6	20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	7	1	6	20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN								
7 1 6 20 1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	7 1 6 20 1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen								